

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Masuknya kolonialisme di Indonesia, telah meninggalkan problem-problem hegemoni budaya dan pengetahuan serta problem-problem sosial, ekonomi (produksi) akibat terjadinya peralihan dari feodalisme ke kapitalisme yang dipaksakan, yang kemudian menciptakan *mode* (tata cara) *produksi kolonial*. Akibatnya, pertanian tinggal menjadi subsisten (pas-pasan), karena semua hasilnya disedot keluar untuk "*Wealth of Nations*"-nya bangsa-bangsa barat.

Berakhirnya kolonialisme bangsa-bangsa yang terjajah (termasuk Indonesia) selanjutnya memasuki era postkolonialisme, di mana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi¹. Era ini ditandai dengan kemerdekaan negara-negara terjajah secara fisik (dekolonisasi), namun dominasi negara-negara penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan kebijakan perubahan sosial. Dalam kaitan itulah sesungguhnya teori pembangunan menjadi bagian dari alat dominasi, karena berbagai teori tersebut menjadi paradigma untuk melanggengkan dan melegitimasi ketergantungan Dunia Ketiga terhadap negara-negara Utara.

¹ Pengertian ini oleh Mansour Fakih ketika menjelaskan pada fase era *developmentalisme/pembangunanisme* sebagai Hegemoni, yaitu kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial Negara Dunia Ketiga oleh Negara-negara kaya (DP). Mansour Fakih, *Sejarah Politik Teori Pembangunan Dan*

Dengan kata lain, pada fase kedua ini kolonialisasi tidak lagi terjadi secara fisik melainkan melalui *hegemoni* yakni dominasi cara pandang dan ideologi.²

Kemenangan AS dan sekutunya dalam PD II, menandai munculnya sebuah bentuk kekuatan baru dalam peta politik global. Sebagai upaya rekonstruksi, konsolidasi dan reorganisasi kapitalisme internasional/neo-imperialisme, Amerika mencoba meletakkan dirinya di posisi dominan dan hegemonik dengan mengangkat suatu tema (*internasionalis liberal-neoliberalisme*) yang didukung dengan operasi ekonomi-politik dan manuver militer, atau bisa juga diartikan bahwa neo-liberalisme bersembunyi di setiap operasi ekonomi dan politik serta manuver militer Amerika, fenomena ini mulai muncul semenjak Amerika memiliki posisi dominan, ketika Eropa mengalami depresi ekonomi akibat perang.³

Di daerah-daerah jajahan, kolonialisme menghadapi tantangan dari perang revolusi kemerdekaan yang menciptakan sikap ambigu dari Amerika, disatu sisi bantuan *Marshall Plan* tidak cukup bagi pembangunan Eropa Barat, namun jika tidak memberikan dukungan bagi dekolonialisasi, maka gerakan revolusi nasional akan mudah dipengaruhi atau bersimpati kepada Uni Soviet. Maka yang mesti dilakukan Amerika adalah mendukung dekolonialisasi dengan memberikan keuntungan bagi Eropa Barat, anti komunis ("*the policy of containment*") dan hegemoni Amerika.⁴

² Mansour Fakih, *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta, Insist Press, 2004, h: 24-25

³ Gunawan *Menjadi Semi Kolonial atau Rencana Ekonomi Reriuana* Makalah Diskusi Publik Dewan

Pembangunan kembali negara-negara Eropa yang telah hancur dalam PD II melalui program *Marshall Plan*⁵, serta dukungan atas proses dekolonialisasi yang didorong oleh AS atas negara-negara Dunia Ketiga yang sedang berjuang memperoleh kemerdekaannya, merupakan sebuah langkah revolusioner, sekaligus kesuksesan AS dalam membangun kekuatan hegemoni yang sesuai dengan garis-garis liberal. Dengan hal itu, berarti merupakan sebuah peluang untuk menarik negara-negara baru tersebut kedalam sistem yang pada akhirnya akan melayani kepentingan-kepentingan negara barat.⁶

Sebagai realisasi dari hal tersebut, *Internasional Monetary Found* (IMF) kemudian didirikan pada tahun 1944 pada konferensi internasional yang berlangsung di Bretton Woods, New Hampshire, dan operasinya di mulai tanggal 1 Maret 1947⁷, serta didirikannya *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang kemudian menjadi *World Bank*⁸.

IMF yang pada awalnya berfungsi sebagai lembaga donor dalam proses rekonstruksi negara-negara Eropa, kemudian berkembang sebagai alat intervensi departemen keuangan AS, khususnya bagi negara-negara berkembang lewat berbagai program pembenahan struktural (*structural adjustment program*).⁹ Adanya IMF dan World Bank, membuat AS dan negara-negara sekutunya yang berhalauan neo-liberal

⁵ Muhadi, Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h: 66

⁶ Ibid, h: 82

⁷ Prof. Dr. A. Hendra Halawi, MA, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, h: 234

⁸ Ibid, h: 252

⁹ Ibid, h: 235

mampu mendikte perkembangan pembangunan dan moneter negara-negara yang menjadi pasien ”-nya”.

Selain dibidang finansial dan keuangan yang sudah terwakili melalui IMF dan World Bank, upaya yang dilakukan AS adalah dengan mendirikan ITO (*International Trade Organization*) dengan format *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), sebuah forum multilateral yang dimaksudkan untuk mengurangi (bukan meniadakan sama sekali) hambatan perdagangan, khususnya *tarrif barrier*. Beberapa negosiasi perdagangan (*trade negotiation*) yang menonjol misalnya *Kennedy Round* (1967) yang didesain untuk menurunkan tariff rata-rata 35 % dinegara-negara industri utama. Kemudian disusul dengan *Tokyo Round* yang dirembukkan dengan sangat alot selama enam tahun, 1973-1979. Skema *Tokyo Round* lebih rumit dibandingkan dengan pendahulunya, karena memasukkan unsur liberalisasi nontarif (*nontariff barriers*). Hingga negosiasi terakhir adalah *Uruguay Round*, yang dimulai tahun 1986. Proses ratifikasinya juga lambat dan mengundang banyak masalah, sampai akhirnya disepakati untuk menggulirkan WTO (*World Trade Organisation*) mulai 1 Januari 1995.¹⁰

Hasil peraturan perundingan Uruguay mencakup 15 bidang, dengan tambahan masalah– masalah baru (*New Issues*) salah satunya mencakup bidang pertanian yang diatur dalam WTO melalui *Agreement on Agriculture (AoA)*. Dengan masuknya pertanian ke dalam cakupan WTO, maka WTO menjadi pengendali dan penentu sektor pertanian bagi negara–negara anggotanya. Hal ini terjadi karena WTO

merupakan organisasi internasional yang memiliki sifat mengikat secara hukum (*Legally binding*) bagi anggotanya. Kebijakan – kebijakan yang termuat dalam AoA meliputi: perluasan akses pasar (*market access*), penurunan subsidi (*domestic support*), pengurangan subsidi ekspor (*export subsidy*).¹¹

Tujuan dari dibuatnya AoA adalah mendukung terciptanya perdagangan bebas (*Free trade*) dibidang pertanian berdasarkan GATT/WTO yang dapat memberi kemanfaatan timbal balik kepada semua negara-negara anggota. Hal ini terlihat pada prinsip perluasan akses pasar, yang mengamanatkan pengurangan hambatan akses masuk bagi produk-produk hasil pertanian import. Hal yang sama juga terkandung pada prinsip-prinsip lainnya yang berupa penurunan subsidi dan pengurangan subsidi ekspor. Ini sesuai dengan tujuan GATT pada awalnya atau yang sekarang dikenal dengan WTO, yaitu menciptakan perdagangan bebas dengan pengurangan pada hal-hal yang menghambat perdagangan internasional, seperti pemberian subsidi ataupun penerapan tarif masuk yang tinggi terhadap barang import. Perluasan akses pasar (*market access*), penurunan subsidi (*domestic support*) dan pengurangan subsidi ekspor (*export subsidy*) merupakan pilar dalam AoA yang pengaruhnya paling besar karena sangat erat persinggungannya dengan perekonomian suatu negara dan kehidupan masyarakatnya khususnya pada para petani.

Sebagai negara anggota yang telah meratifikasi WTO melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade*

¹¹ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian : Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, The Institute for Global Justice, Jakarta, 2002, h: 141

Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) maka Indonesia pun harus menyelaraskan kebijakan nasionalnya di bidang pertanian seperti yang telah disepakati dalam AoA. Hal ini berarti Indonesia berkewajiban untuk mengurangi atau menghapus berbagai subsidi dan hambatan non-tarif di sektor pertanian sebagai komitmen menjadi negara anggota dalam WTO.

Oleh karenanya wajar jika bangsa ini mengalami krisis pangan secara berkala (*transitory/ occasional food insecurity*) dan kronis (*chronic food insecurity*)¹² akibat adanya persaingan yang tidak seimbang antara petani dan pedagang-pedagang kecil melawan perusahaan-perusahaan transnasional/ perusahaan multinasional yang difasilitasi oleh negara dan lembaga-lembaga Internasional seperti WTO melalui proses liberalisasi yang membabi buta.

B. POKOK PERMASALAHAN

“Bagaimana praktek hegemoni Neo-Liberalisme terhadap kedaulatan pangan di Indonesia ?”

C. Kerangka Dasar Teoritik

1. Teori Hegemoni

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut ‘eugemonia’, sebagaimana yang dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau

¹² Adhianus Surodi, *Krisis Pangan dan Solidaritas Komunitas*, 14 Juni 2008

citystates) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar.

Dalam pengertian dijamin ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara "*pemimpin*".¹³

Dalam perkembangannya, teori hegemoni kemudian dikembangkan oleh Antonio Gramsci, dalam karyanya seperti *Selections From The Prison Notebooks* yang banyak mengupas tentang konsep hegemoni. Dimana Gramsci banyak menjelaskan mengapa suatu kelompok kelas secara sukarela atau dengan konsensus mau menundukkan diri pada kelompok atau kelas lain.

Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual.¹⁴

Dalam catatannya terhadap karya Marchiavelli, *The Prince*, (sang penguasa), Gramsci menggunakan *centaur* mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari 'prespektif ganda' suatu tindakan politik-kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni

¹³ Negeri Batin dan Andi Arif, *Antonio Gramsci: The Prince and the Poet*, (Bandung: Pustaka Baru, 2004), hal. 100.

bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.¹⁵

Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan "dominasi," yaitu kekuasaan yang ditopang dengan kekuasaan fisik.¹⁶

Sekalipun demikian, Gramsci tidak menyangkal kemungkinannya digunakan kekuatan dan koersi, ia menolak penekanan yang diberikan Marxis klasik pada kemungkinan tersebut sebagai satu-satunya fondasi dimana dominasi kelompok (-kelompok) yang berkuasa ditegakkan. Sebaliknya ia justru berpendapat bahwa penggunaan kekuatan hanyalah salah satu dari bermacam-macam bentuk kekuasaan. Berkenaan dengan ini, ia berpendapat bahwa kohesi internal benar-benar hadir dalam masyarakat kapitalis barat terlepas dari penggunaan kekuasaan oleh kelompok (-kelompok) berkuasa atau negara. Stabilitas ini menurutnya, muncul sebagai akibat dari inkorporasi mereka yang dikuasai kedalam sistem yang berlaku, yakni ideologi, moral dan kultur penguasa. Dan keberhasilan luar biasa inkorporasi inilah yang

¹⁵ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Insist Press & Dutaoka Balajar, Yogyakarta, 2004

membuatnya yakin bahwa penggunaan kekuasaan secara berlebihan adalah sesuatu yang tidak perlu.¹⁷

Gramsci juga membagi keberadaan hegemoni dalam dua wilayah super struktur, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik atau negara. Dalam kamus Marxis ortodoks bahwa basic struktur pasti akan mempengaruhi super struktur. Inilah yang kemudian ditolak oleh Gramsci, melihat arti penting “ruh” dan “ide” seperti halnya dalam filsafat Hegel dalam mempengaruhi kesadaran manusia dalam wilayah super struktur yang ternyata mampu mempertahankan bentuk basic struktur. Baginya, kedua level tersebut pada satu sisi berkaitan dengan fungsi ‘hegemoni’ dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan ‘dominasi langsung’ atau perintah yang dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan ‘yuridis’.¹⁸

Kapitalisme dapat bertahan karena kaum borjuis mampu membangun dan mempertahankan hegemoninya terhadap kelas pekerja, sedangkan kaum intelektual ploretariat (partai, fungsi partai adalah mengintegalkan intelektual secara massal) yang memiliki wilayah hegemoni bagi kelas pekerja ternyata gagal menggerakkan kelas pekerja untuk melakukan perjuangan-perjuangan kelas dan revolusi akibat direduksinya pemikiran Karl Marx menjadi bentuk Darwinisme dan Determinisme, yang percaya akan keruntuhan kapitalisme dan keniscayaan revolusi akan terjadi dengan sendirinya dalam sebuah “*hukum besi sejarah*”. Serta meletakkan landasan

dan strategi perjuangan pada prespektif determinan ekonomi. Hal ini didasarkan atas fiasfat Materialisme Dialektika Historis, yang melihat bahwa sejarah dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh alat produksi yang kemudian disebut sebagai basic stucture yang merupakan bagian bawah yang mempengaruhi bangunan atas, atau super structure (negara, ideologi, politik).

Bagi Gramsci titik tolak pembangunan hegemoni adalah konsensus, penerimaan konsensus ini bagi proletariat dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran, namun hal itu bisa terjadi bagi Gramsci lebih dikarenakan kurangnya basis konseptual yang dimiliki kelas pekerja sehingga permasalahan sesungguhnya bisa dimanipulasi.

Ada dua hal mendasar yang menurut Gramsci menjadi biang keladinya yaitu pendidikan disatu pihak dan mekanisme kelembagaan dipihak lain. Untuk itu Gramsci mengatakan bahwa pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berfikir kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, parpol, media massa dan sebagainya) menjadi "tangan-tangan" kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan¹⁹.

¹⁹ Nezar Patria & Andi Arief, Op-cit, h:127

Dalam pengertian inilah konsepsi ideology Gramsci sebagai “instrument dominasi” yang merupakan sisi lain dari fungsinya sebagai “instrument pembebasan”. Ideology dapat “menjustifikasi” atau melegitimasi kepentingan kelompok penguasa. Legitimasi semacam itu bukanlah buah dari konsensus yang dibuat massa, tetapi hasil dari dominasi ideology kelompok penguasa dengan mencegah timbulnya kesadaran kritis mereka yang dikuasai. Oleh karenanya, kelompok penguasa harus “menguniverasalkan” pandangan dan kepentingannya serta harus memastikan bahwa pandangan dan kepentingan itu tidak hanya bisa tetapi juga harus menjadi pandangan dan kepentingan kelompok- kelompok subordinat.²⁰

Disini kemudian Gramsci melihat arti penting intelektual sebagai alat organisir bagi hegemoni, yang dalam istilah Gramscian kemudian disebut sebagai “intelektual organik”. Ada dua tema yang perlu digaris bawahi dari pandangan Gramsci terhadap intelektual. *Pertama*, perlunya menghapus kerja manual dan kerja intelektual yang telah berlangsung lama dibawah kapitalisme dalam proses produksi, dalam masyarakat sipil, juga dalam aparat negara. *Kedua*, hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan – watak kekuasaan yang lahir dari sesuatu yang mirip monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa dan perlunya perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam transisi menuju sosialisme.

”Intelektual bukan dicirikan oleh semua orang, namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa semua orang

Bagi Gramsci intelektual merupakan 'deputi' atau agen kelas dalam mengorganisir hegemoni dalam masyarakat sipil dan dominasinya melalui aparat negara. Dari konsepsinya mengenai intelektual Gramsci coba menjabarkan lebih jauh konsepsinya mengenai intelektual organik:

Intelektual organik adalah intelektual yang berasal dari kelas tertentu bisa jadi berasal dari klas borjuis dan memihak mereka, bisa juga berasal dari klas buruh dan berpihak kepada perjuangan buruh. Kelompok-kelompok ini berpenetrasi sampai kemassa. Memberikan mereka sebuah pandangan dunia baru dan menciptakan kesatuan antara bagian bawah dan atas.²²

Dari uraian diatas, jelas bahwa wilayah kesadaran adalah hal yang utama bagi Gramsci untuk perjuangan klas bawah melawan klas dominan. Penalaran ini kemudian yang membawa Gramsci berfikir untuk mengembangkan strategi alternatif. Ia menyebutnya "perang posisi" (war of position). Perang posisi berbasiskan pada gagasan mengepung aparatus negara dalam suatu counter-hegemoni, diciptakan oleh organisasi massa klas pekerja dan dengan membangun lembaga-lembaga serta mengembangkan budaya proletar. Dasar srategi Gramsci, dengan demikian, tidaklah mengorganisir klas buruh dan petani dalam rangka memberikan serangan frontal pada negara, namun sebagai fondasi dari sebuah budaya baru-suatu norma dan nilai baru dari masyarakat proletar.

²² Negeri, Datin & Andi Arief, Op. cit. h. 161, 162

Jadi, pada prinsipnya, serangan 'perang posisi' adalah serangan berkelanjutan terhadap superstruktur kebudayaan bagi negara-negara yang telah maju secara industrial. Sementara itu, hal ini tidaklah menutup kemungkinan, yang muncul walau waktunya sudah matang, akan 'perang siasat (war of maneuver)' atau tindakan revolusioner biasa, secara kilat dengan menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemimpin-pemimpin kapitalis, ketika mereka menggunakan mengandalkan kekerasan untuk mempertahankan kedudukan mereka.²³

Kemenangan AS dan sekutunya yang berhaluan internasionalis liberal/ neo-liberalisme dalam PD II serta runtuhnya rezim komunis di Uni Soviet menandai sebuah bentuk reorganisasi kekuatan kapitalisme global seiring dengan terbentuknya berbagai lembaga donor seperti IMF, World Bank maupun WTO. Kemenangan tersebut pada kenyataannya membuat neo-liberalisme mampu menyetir wacana ekonomi-politik global secara konsensus (hegemoni), khususnya bagi negara-negara dunia ketiga yakni melalui berbagai agenda-agenda pembangunan dan modernisasi yang didukung dengan serangkaian paket bantuan pinjaman maupun melakukan suversib sebagai politik luar negeri melalui sabotase ekonomi-politik, mendukung gerakan separatis dan kudeta militer atau bahkan invasi militer.

Namun karena Perang Dingin usai, *high cost production* akibat pemerintahan rezim militer yang korup, serta Dunia Ketiga harus di-"demokratis"-kan dalam pengertian liberal, khususnya di bidang ekonomi sehingga menghilangkan berbagai hambatan, seperti tarif, proteksi, budaya dan lainnya, Amerika mulai mencabut

²³ Ibid, h; 172-173

dukungan terhadap rezim militer. Ketergantungan yang tinggi terhadap dollar AS, mengakibatkan gangguan dalam sistem moneter yang berdampak pada krisis ekonomi dan politik, seperti yang dialami oleh Orde Baru di tahun 1997, yang berdampak kekuasaan ekonomi dan politik IMF di Indonesia menjelang akhir pemerintahan Soeharto dan pemerintahan-pemerintahan penggantinya.²⁴

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, mau tidak mau membuat Indonesia harus menyepakati berbagai paket kesepakatan yang terangkum di dalam Letter of Intent (LoI) dengan IMF guna menghadapi krisis financial yang sedang terjadi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan proses liberalisasi secara radikal diseluruh sektor ekonomi khususnya disektor pertanian. Disisi lain Indonesia juga telah terikat dengan perjanjian disektor pertanian dengan WTO yang terangkum dalam Agreement On Agriculture (AoA) sebagai prinsip dari *laissez faire*. Akibatnya ketika sector pertanian nasional hanya menjadi sebuah komoditi bagi kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional dari negara-negara industri maju, tentunya hal tersebut berarti juga merupakan kehancuran bagi kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Karena negara menyerahkan system pertanian dan nasib petani kepada mekanisme perdagangan bebas, yakni siapa yang kuat dia akan menang, dan yang lemah akan kalah, yang kuat adalah perusahaan-perusahaan importir transnasional/ multinasional yang menguasai alat produksi yang canggih

serta dukungan modal yang besar, sedangkan yang lemah adalah mayoritas petani dan masyarakat pedesaan yang kehidupannya serba terbatas, subsisten dan tradisional. Maka wajar jika jauh hari sebelumnya mendiang presiden Soekarno menyebut AS dengan paham neo-liberalisme-nya sebagai bentuk baru dari kolonialisme atau *neo-kolonialisme-imperialisme* dan bagi Lenin, Imperialisme merupakan ekspresi puncak tertinggi dari kapitalisme / *The highest stage of capitalism*.

2. Konsep Kedaulatan pangan

Konsep kedaulatan pangan lebih mengutamakan bagaimana kebijakan pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka. Ini menyangkut hak yang sebenarnya terhadap pangan dan produksi pangan, sehingga orang mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan cocok dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya.

Hal di atas telah dideklarasikan oleh 400 delegasi yang berasal dari organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, LSM, aktivis sosial, akademisi dan peneliti dari 60 negara pada Pertemuan Dunia tentang Kedaulatan Pangan (World Forum on Food Sovereignty) di Havana, Kuba pada tanggal 3 sampai 7 September 2001. Konsep kedaulatan pangan ini kemudian dimatangkan pada Pertemuan Puncak Pangan Dunia

(World Food Summit) pada tanggal 8 sampai 13 Juni 2002, di Roma, dihadiri oleh 700 organisasi masyarakat sipil dunia.²⁵

Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak atas pangan yang disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada Bulan Februari 2004, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak rakyat, komunitas-komunitas, dan negeri-negeri untuk menentukan sistem-sistem produksinya sendiri dalam lapangan pertanian, perikanan, pangan dan tanah, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang secara ekologi, sosial, ekonomi dan kebudayaan sesuai dengan keadaan-keadaan khusus (keunikannya, penj) masing-masing.²⁶

Selanjutnya organisasi tani internasional *La Via Campesina* mendefinisikan kedaulatan pangan adalah suatu hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari negara lain.²⁷ Artinya bahwa kedaulatan pangan merupakan hak sebuah negara dan juga “rakyatnya”, dalam hal ini “petani”nya untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin penguasaan petani atas tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil, serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping. Kedaulatan Pangan tidak melarang adanya perdagangan pangan, tetapi produksi pangan haruslah diprioritaskan untuk

²⁵ Iswan Kaputra, *Refleksi Terhadap Kurang Berdayanya Konsep Ketahanan Pangan Nasional*, <http://iswank.multiply.com/journal/item/18>

²⁶ Aliansi Gerakan Reforma Agrari (AGRA), *Modul tentang Kedaulatan Pangan*, http://www.foodsov.org/resources/article_bi_000007.pdf

²⁷ *Bandungan dan Sikap Dalam ESPI tentang Kedaulatan Pangan*, http://www.foodsov.org/resources/article_bi_000007.pdf

memenuhi kebutuhan keluarga dan lokal sehingga menjamin hak atas pangan bagi setiap orang, diproduksi dengan cara ekologis (agro-ecology) yaitu pertanian berkelanjutan berbasiskan pada keluarga tani (sustainable agriculture based on family farming). Kedaulatan pangan secara prinsipil juga menjamin harga yang adil dan menguntungkan serta tak lebih rendah dari ongkos produksi terhadap produsen, dan di sisi lain juga menjamin harga yang fair terhadap konsumen.²⁸

Konsep kedaulatan pangan sendiri sebenarnya juga merupakan sebuah counter dari konsep ketahanan pangan yang selama ini didorong oleh negara-negara maju melalui berbagai lembaga internasional seperti WTO maupun perusahaan-perusahaan Transnasional/ multinasional, yang menempatkan pangan sebagai sebuah “komoditi” yang bisa diperjual-belikan tanpa harus ada batasan-batasan yang dapat mendistorsi harga maupun kesempatan bagi siapa pun yang ingin mendapatkannya.

Akibatnya ada 2 paradigma yang sangat kontradiktif, yakni antara konsep ketahanan pangan yang diusung oleh negara-negara maju, dengan konsep kedaulatan pangan yang diusung oleh negara-negara berkembang yang biasanya masih bersifat agraris seperti Indonesia. Bagi negara-negara maju, yang tentu saja memiliki keunggulan dibidang tekhnologi dan industri serta pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, tentu sektor pertanian ataupun pangan bukan menjadi prioritas dalam arah kebijakan pembangunan mereka saat ini, meskipun tidak bisa pungkiri sector pertanian mereka tetap dilindungi secara ketat terhadap berbagai pengaruh dari luar.

²⁸ Mohamed Elwan, *Comita dan Mulya: Kaya / Kemiskinan Indonesia*, 11 (2007/08/16)

Namun keterbatasan lahan pertanian, iklim yang tidak begitu cocok jika dibandingkan dengan negara-negara yang beriklim tropis seperti negara-negara di Asia maupun Afrika, serta kemampuan dalam mengelola teknologi pertanian, membuat mereka lebih memilih menempatkan sector tersebut sebagai sebuah komoditi yang bisa diperjual-belikan secara bebas. Karena dengan cara itulah mereka akan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi negaranya serta mendapatkan keuntungan yang besar dari keunggulan teknologi yang mereka miliki khususnya disektor pertanian.

Disisi lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menggantungkan pada sektor pertanian, tentu saja hal tersebut akan sangat merugikan karena mereka merupakan negara agraris. Jika dengan serta merta menempatkan sector tersebut sebagai sebuah komoditi yang secara bebas menuntut untuk diperjual-belikan tanpa adanya proteksi dari negara, tentu saja akan memungkinkan terjadi politik dumping dimana harga dalam negeri akan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga ekspor. Bagi negara-negara maju yang memiliki surplus dari teknologi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin bisa saja membeli harga yang lebih mahal dari kemampuan daya beli masyarakat di negara-negara berkembang, namun pertanyaannya bagaimana dengan sebaliknya? Dalam konteks itulah apa yang dikemukakan oleh Paul Sweezy dan Paul Baran sebagai *unequal-exchange* (pertukaran yang tidak seimbang)²⁹ antara negara-negara maju dengan negara-negara dunia ketiga / negara berkembang seperti Indonesia, akibat dimonopolinya surplus yang seharusnya menjadi keunggulan komperatif bagi tiap-tiap negara oleh negara-

²⁹ Bonnie Setiawan, *Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga*, Putaka Pelajar, 1999, h : 13-14



negara maju. Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin bangsa ini hanya akan menjadi mandor pangan pihak-pihak asing diatas limpahan kekayaan alam dan penderitaan rakyatnya.

Oleh karenanya, pangan harus didudukkan sebagai hak yang paling dasar dari warga negara serta salah satu unsur dari kekuatan nasional dalam politik antar bangsa. Hans J Morgenthau menyebutkan, negara yang berswasembada atau hampir berswasembada, mempunyai keuntungan besar atas negara yang tidak demikian keadaanya dan harus sanggup mengimpor bahan pangan yang tidak dihasilkannya, kalau tidak, akan menderita kelaparan.³⁰ Jadi swasembada pangan selalu menjadi sumber kekuatan yang besar bagi sebuah negara, karena jika sebuah negara tidak lagi berdaulat atas pangan berarti telah terjadi distorsi atas kedaulatan nasional bangsa tersebut.

Artinya bahwa sektor pertanian tidak hanya hanya sekedar sebuah paket industri, seperti industri sepatu misalnya. Petani adalah pelindung sah lingkungan hidup. Sektor pertanian tidak hanya memberi makanan dan pakaian kepada manusia selama ribuan tahun, tetapi juga menjamin dan melindungi sebuah ekosistem yang sehat. Penghancuran kehidupan petani adalah penghancuran lingkungan hidup, sejarah, kebudayaan serta peradaban dari sejumlah besar penduduk dunia. Oleh karenanya sebagai hak dasar, maka pangan merupakan hak asasi manusia di mana negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk menghormati (*to respect*),

³⁰ Hans J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, 1999, h. 174-175

melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas pangan masyarakat bukannya justru menjadikan pangan sebagai komoditas dagang.³¹

D. Hipotesa

Praktek hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan instrumen WTO melalui:

1. kebijakan liberalisasi disektor pertanian
2. kebijakan liberalisasi disektor perdagangan

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori digunakan sebagai dasar analisa untuk diperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan dapat disimpulkan. Penekanannya pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.³²

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis mencoba mengamati permasalahan tersebut secara empirik dengan menerapkan studi pustaka dan berbagai sumber yang ada, seperti buku-buku referensi, surat kabar, majalah, jurnal, internet, dan beberapa data pendukung lainnya.

³¹ IHCS ed all, *Critical Review Undang-Undang Pangan*, Indonesian Human Right Committee for Social Justice, 2008, h : 5

³² Saifuddin Azhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, 1999, h : 50

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan dalam penulisan ini adalah mulai dari tahun 1997 yakni semenjak pasca terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang juga menandai masifnya proses liberalisasi pertanian di Indonesia melalui kesepakatan WTO disektor pertanian; *Agreement on Agriculture (AoA)*, hingga tahun 2007 (masa pemerintahan SBY-JK) yang menandai 10 tahun berjalannya kebijakan liberalisasi pertanian dan pangan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat unsur-unsur metodologis yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah yang meliputi ; Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar/ teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, menjabarkan bagaimana konsolidasi, reorganisasi dan kebangkitan neo-liberalisme pasca kemenangan AS pada perang PD II hingga terbentuknya WTO sebagai kekuatan hegemoni yang menentukan kebijakan perdagangan dunia khususnya terkait dengan liberalisasi disektor pertanian yang kemudian berimbas pada persoalan kedaulatan pangan di Indonesia.

Bab Ketiga, menjabarkan bagaimana kondisi pangan di Indonesia seiring dengan diberlakukannya perjanjian WTO yang berkaitan dengan sektor pertanian yakni, *Agreement on Agriculture (AoA)* oleh pemerintah RI, permasalahan apa yang timbul dan kebijakan yang muncul dari kebijakan tersebut

Bab Keempat, merupakan merupakan bab yang akan memberikan penilaian atas pelaksanaan agenda neoliberalisme pada sektor pangan di Indonesia yang bersandarkan pada fakta-fakta yang berkembang, yang merupakan pembuktian atas hipotesa,

Bab Kelima, Kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini.